

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016-2021 (PERUBAHAN)



DISUSUN OLEH:

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Perubahan) tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sintang dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sintang merupakan suatu perencanaan 5 (lima) tahun kedepan sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang ini juga memuat arah dan tujuan kegiatan sebagaijabaran visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Sintang, April 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Sintang,



Ir. H. ZULKARNAEN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611107 199303 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM SKPD	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya SKPD	24
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	28
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
4.1 Visi dan Misi SKPD	49
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	51
4.3 Strategi dan Kebijakan	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	61
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	75
BAB VII PENUTUP	80
LAMPIRAN I	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) perubahan tahun 2017-2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sintang merupakan pedoman dalam Pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang tertuang didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016– 2021 yang didalamnya memuat penjabaran Visi, Misi serta Program, Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang baru terbentuk akhir tahun 2016 oleh sebab itu Dinas Ketahanan Pangan perlu untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan, adapun tujuan dibentuknya SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Sintang dalam merumuskan kebijakan perencanaan peningkatan ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, oleh karenanya wajib menyusun rancangan Renstra Perubahan tahun 2016- 2021.

Renstra perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi acuan pada penyusunan program dan kegiatan dalam musyawarah pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang. Rancangan Renstra ini selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, juga memuat skala prioritas program dan kegiatan dari urusan wajib ketahanan pangan dan perikanan yang akan dilakukan selama kurun waktu lima tahun ke depan dan karenanya Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Periode 2016 - 2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.



Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis yang memuat tentang visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan, target pencapaian, kendala yang dihadapi serta program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Renstra perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2017 – 2021 juga merupakan kerangka pikir dalam penyelenggaraan pembangunan bidang penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bukan hanya sebagai suatu dokumen perencanaan Unit Kerja yang berisi berbagai kebijakan, program dan strategi Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan, tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan pertanggung jawaban publik (Public Accountability) dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) beserta perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang tahun 2016- 2021 mengalami beberapa perubahan menyangkut Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang termuat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Periode 2016 – 2021 mempunyai hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun



secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat dan Renstra Departemen Pertanian yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang dihadapi di Kabupaten Sintang dan disesuaikan dengan kearifan lokal;
2. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang periode 2016–2021 merupakan penjabaran lebih dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2016-2021 dibidang Peyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang memuat arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Renstra perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 dengan dokumen perencanaan Kabupaten Sintang adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang menampung aspirasi hasil musrenbang daerah mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar pemikiran tersebut, berikut ini disusun rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang tahun 2016 - 2021.

1.2. **LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Renstra perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



-
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - (8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



-
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - (15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - (17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
 - (19) Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
 - (20) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
 - (21) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten



Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

- (22) Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 917).
- (23) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Pasal 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang pasal 3 huruf d);
- (24) Peraturan Bupati Sintang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2017-2021 disusun dengan maksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perencanaan pembangunan bidang Peyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan Peyelenggara peningkatan Ketahanan Pangan, keamanan pangan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Sintang.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2017– 2021 adalah :

- a. Adanya suatu Perencanaan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah di bidang Peyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Adanya program-program prioritas Peyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang baik sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- c. Terciptanya sinergitas program-program pembangunan di Kabupaten Sintang sehingga dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang;
- d. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program–program Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2017 – 2021.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD



-
- 5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
(digambarkan melalui matrik)
 - 5.3. Keterkaitan Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
(digambarkan melalui matrik)
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**
- 6.1. Kaidah Pelaksanaan Renstra SKPD
 - 6.2. Pedoman Penyusunan Rencana Transisi
- BAB VII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan SOPD baru dibentuk tahun 2016 berdasarkan PERDA No. 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan PERBUP No. 115 tentang SOTK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan tugas penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki tenaga penyuluh perikanan senior sebanyak 6 orang yang dibantu oleh 3 orang tenaga Penyuluh honorer lepas yang membina di 14 (empat belas) Kecamatan.

Berdasarkan pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode tahun 2010-2015 Program Gerbang Emas Jakarta Selatan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan menempatkan sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan Kehutanan dan Upaya-upaya untuk menciptakan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas Pemerintah Daerah. Untuk itu Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang meliputi :

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang yang sebagian besar hidup sebagai petani.
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan inovasi teknologi pertanian, perikanan, kehutanan maupun ketahanan pangan.
4. Peningkatan pendapatan dan nilai tambah produksi yang dihasilkan.

Adapun program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada pelaksanaan RPJMD periode tahun 2011-2015 antara lain Pencapaian Ketahanan Pangan Kabupaten dengan indikator kinerja Output dan Outcome tertanganinya daerah rawan pangan dengan terbangunnya lumbung pangan desa di 14 (empat belas) Kecamatan dengan capaian total cadangan pangan daerah sampai dengan tahun 2015 sebesar 29,325 Ton.

Dalam kegiatan penyediaan cadangan pangan daerah ini hampir tidak terdapat kendala namun satu-satunya masalah yang dihadapi hanya persoalan perubahan



harga beras yang terjadi pada tahun 2015 sehingga target 10 ton yang ingin dicapai hanya terealisasi sebesar 9,325 ton.

Guna mendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan tugas di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- h. penyusunan penetapan Kinerja di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- i. penyusunan analisa jabatan;
- j. penyusunan pengawasan melekat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a. Subbag Keuangan dan Program
 - b. Subbag Aparatur dan Umum, dan
 - c. Subbag Perlengkapan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Distribusi Pangan, dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan



-
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Konsumsi Pangan, dan
 - b. Seksi Keamanan Pangan
 5. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Perikanan Budidaya, dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana pengorganisa Kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Bidang Perikanan;
- b. penyampaian program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada Bupati;
- c. penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. pembinaan UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan pengendalian internal;
- h. penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- i. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada Bupati;
- k. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- m. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;



- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang meliputi urusan program dan keuangan, aparatur dan umum, dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, mengoordinasikan dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. penghimpunan, penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- g. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang dilingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1. Sub Bagian Keuangan dan Program

Adapun tugas dari Sub Bagian Keuangan dan Program adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;



-
- b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
 - d. membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - e. mengkoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - f. menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
 - g. mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - h. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - k. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - l. penyelenggaraan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - m. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2.2. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Adapun Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;



-
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas);
 - c. menyiapkan/menyusun bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, SKP, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - f. meningkatkan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas;
 - g. melaksanakan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, humas, kearsipan dan kepustakaan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
 - j. menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2.3. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan merupakan bagian yang mengurus rumah tangga dinas dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. melakukan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;



-
- d. menginventarisasi aset, perlengkapan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - e. menyusun, merencanakan dan menghimpun kebutuhan perlengkapan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - f. mengumpulkan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pada bidang tugasnya;
 - g. merencanakan, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - h. melaksanakan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
 - j. menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- e. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;



-
- g. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan, koordinasi pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - h. Penyiapan kordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. Penyiapan dan pengelolaan cadangan pemerintah abupaten;
 - j. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Seksi Ketersediaan Pangan

Untuk menunjang penyelenggaraan tugas Bidang Kesediaan dan Distribusi Pangan di bantu oleh Seksi Ketersediaan Pangan dengan fungsi sebagai berikut :

:

- a. Penyusunan program kerja tahunan tahunan Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi bidang ketersediaan pangan;
- c. Penyiapan bahan analisis bidang ketersediaan pangan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan pangan;
- e. Penyiapan bahan pendampingan kegiatan bidang ketersediaan pangan;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan pangan;
- g. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- h. Penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan
- i. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- k. Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan



- n. Pelaksanaan tugas lainnya oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Seksi Distribusi Pangan

Untuk menunjang penyelenggaraan tugas Bidang Kesiediaan dan Distribusi Pangan di bantu oleh Seksi Distribusi Pangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan distribusi pangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi bidang distribusi pangan;
- c. Penyiapan bahan analisis bidang distribusi pangan;
- d. Penyiapan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi pangan;
- e. Penyiapan bahan pendampingan kegiatan bidang distribusi pangan;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang distribusi pangan;
- g. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Seksi Kerawanan Pangan

Untuk menunjang penyelenggaraan tugas Bidang Kesiediaan dan Distribusi Pangan di bantu oleh Seksi Kerawanan Pangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Kerawanan Pangan;
- b. Penyiapan koordinasi bidang kerawanan pangan;
- c. Penyiapan bahan analisis bidang kerawanan pangan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang kerawanan pangan;
- e. Penyiapan bahan pendampingan kegiatan bidang kerawanan pangan;



-
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kerawanan pangan;
 - g. Penyiapan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
 - h. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
 - i. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
 - j. Penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
 - k. Penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;



-
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi serta promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - i. penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
 - j. penyiapan pengoordinasian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1. Seksi Konsumsi Pangan

Adapun Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :penyusunan program kerja tahunan Seksi Konsumsi Pangan;

- a. penyiapan bahan koordinasi bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan analisis bidang konsumsi pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi pangan;
- d. penyiapan bahan pendampingan kegiatan bidang konsumsi pangan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi pangan;
- f. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
- g. penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- h. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan promosi, edukasi dan informasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Seksi Keamanan Pangan

Adapun Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :



-
- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Keamanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi bidang keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis bidang keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang keamanan pangan;
 - e. penyiapan bahan pendampingan kegiatan bidang keamanan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keamanan pangan;
 - g. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - h. penyiapan bahan jejaringan keamanan pangan daerah;
 - i. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - j. penyiapan bahan koordinasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - k. Pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budaya dan pengembangan usaha perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Perikanan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- c. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan serta perumusan kebijakan pengelolaan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI);
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan proses perijinan bidang perikanan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan statistik perikanan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan



-
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.1 Seksi Perikanan Tangkap

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perikanan dibantu oleh Seksi Perikanan Tangkap dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Perikanan Tangkap;
- b. Penyusunan rencana pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan untuk perlindungan nelayan kecil;
- e. Penyiapan bahan untuk penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengembangan sarana dan prasarana, pemberdayaan kelembagaan dan pengawasan TPI;
- g. Penelahaan dan penyiapan dokumen Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKIH);
- h. Pelaksanaan inventarisasi potensi areal penangkapan ikan;
- i. Pelaksanaan upaya pelestarian dan pembinaan sumber daya ikan perikanan tangkap;
- j. Penyusunan dan pelaporan statistik dan informasi perikanan tangkap; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.2. Seksi Perikanan Budidaya

Selain Seksi Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan juga dibantu oleh Seksi Perikanan Budidaya yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Perikanan Budaya;
- b. Penyusunan rencana pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan penataan sentra usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. Penyiapan bahan untuk penyusunan rencana pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan untuk perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan bahan pengawasan usaha budaya ikan;



-
- g. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - h. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan layanan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - i. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan layanan penyiapan benih, calon induk dan induk ikan bermutu;
 - j. Penyiapan bahan untuk penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - k. Penyiapan bahan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan tentang layanan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - l. Penelaahan dan penyiapan dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - m. Penyusunan dan pelaporan statistik serta informasi perikanan budidaya;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.3. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perikanan dibantu oleh Seksi Pengembangan Usaha Perikanan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
- b. Penyusunan rencana pengembangan usaha perikanan;
- c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha perikanan;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana usaha pengembangan ikan;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan analisis serta pembinaan pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah produk perikanan;
- f. Pelaksanaan pembinaan peningkatan konsumsi ikan masyarakat;
- g. Penelaahan dan penyiapan dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
- h. Penyusunan dan pelaporan statistik serta informasi pengembangan usaha perikanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.



2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Perangkat Aparatur

Tabel : 2.1
Data Kepegawaian DKPP Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi Kepegawaian	Pria	Wanita	Total
1	2	3	4	5
1	PNS dan CPNS pada Jabatan Struktural	25	10	35
2	PNS dan CPNS Jabatan Fungsional Penyuluh	3	3	6
3	THL-TBPP	2	1	3
4	Tenaga Kontrak Honorer (Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan)	2	1	3
	JUMLAH	32	15	47

Sumber : Nominatif Pegawai DPP Bulan April 2017

Tabel : 2.2
Data Kepegawaian DKPP Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)			
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL PENYULUH	THL-TBPP	ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang	- Orang	- Orang	- Orang
2.	Sarjana (S1)	18 Orang	4 Orang	3 Orang	1 Orang
3.	Diploma IV (D.IV)	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
4.	Diploma III (D.III)	1 Orang	- Orang	- orang	1 Orang
5.	Diploma II (D.II)	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
6.	Diploma I (D.I)	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
7.	SLTA	12 Orang	2 Orang	Orang	8 Orang
8.	SLTP	- Orang	- Orang	- Orang	Orang
	JUMLAH	45 Orang	6 Orang	3 Orang	10 Orang

Sumber : Nominatif Pegawai DKPP Bulan April 2017



Tabel : 2.3
Data Kepegawaian DKPP Berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL PENYULUH
1	2	3	4
1.	Golongan IV.c	1 Orang	- Orang
2.	Golongan IV.b	2 Orang	- Orang
3.	Golongan IV.a	3 Orang	- Orang
4.	Golongan III.d	9 Orang	- Orang
5.	Golongan III.c	4 Orang	1 Orang
6.	Golongan III.b	9 Orang	1 Orang
7.	Golongan III.a	3 Orang	2 Orang
8.	Golongan II.d	1 Orang	1 Orang
9.	Golongan II.c	- Orang	1 Orang
10.	Golongan II.b	2 Orang	Orang
11.	Golongan II.a	1 Orang	- Orang
JUMLAH		35 Orang	6 Orang

Sumber : Nominatif Pegawai DKPP Bulan April 2017



Keadaan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang sampai dengan April 2017 terdiri dari PNS dan sebanyak 41 orang dan Tenaga Harian Lepas–Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 3 orang serta tenaga kontrak honorer tenaga Administrasi 1 orang dan tenaga kebersihan 2 orang, sehingga total sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berjumlah 46 orang. Dari total 46 orang sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari 37 orang pada jabatan struktural sedangkan 4 orang merupakan jabatan fungsional umum 6 orang tenaga penyuluh PNS dengan 3 orang tenaga bantu penyuluh perikanan sehingga total sumberdaya penyuluh yang ada sebanyak 9 orang. Keberadaan penyuluh yang cukup optimal dengan sebagian penyuluh senior yang telah berpengalaman diharapkan dapat mewujudkan salah satu dari 9 Agenda Prioritas Nawacita ketahanan pangan yang merupakan prioritas ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik serta mewujudkan tujuan Program Aksi Trisakti yang merupakan prioritas ke-2 dalam bidang ekonomi yaitu membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.

Berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang tergambar pada Tabel 2.2. dengan jumlah sumber daya manusia terbanyak terletak pada tingkat pendidikan Sarjana (S1), dan dibantu oleh tenaga terpelajar ditingkat pendidikan Pasca Sarjana, Diploma dan SLTA, kondisi ini cukup dapat menggambarkan bahwa tingkat kualitas sumber daya manusia yang tersedia dimungkinkan dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang yang sebagian besar hidup sebagai petani baik itu disektor pertanian, maupun disektor perikanan dan kehutanan.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang adalah:

1. Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang

Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari 1 (satu) unit, terletak Jalan Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp (0565) 21608.



2. Sarana Perlengkapan/Peralatan Kantor dan termasuk sarana transportasi dan barang inventaris lainnya sebagian telah dilaksanakan serah terima barang.

Tabel 2.5

Sarana Perlengkapan Peralatan Kantor dan Sarana Transportasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2017

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2.	Bangunan Balai Penyuluh Perikanan		
3.	Portable Pump	1 Item	Baik
4.	Station Wagon (Isuzu dan Innova)	2 Unit	Baik
5.	Sepeda Motor (Dinas dan Lapangan)	62 Unit	Baik
6.	Global Positioning System	6 Unit	Baik
7.	Lemari Kayu	7 Item	BBaik
8.	Rak Kayu	8 Item	7 baik, 1 Rusak Berat
9.	Meja Kayu/Rotan	2 Item	Baik
10.	Kursi Besi/Metal	50 Item	Baik
11.	Meja Rapat	48 Item	Baik
12.	Meja Podium	1 Item	Baik
13.	Kursi Rapat	55 Item	Baik
14.	Kursi Tamu	11 Item	Baik
15.	Kursi Putar	7 Item	Baik
16.	Kursi Kerja	32 Item	Baik
17.	Kursi Lipat	81 Item	Baik
18.	Meja ½ Biro	68 Item	Baik
19.	Meja 1 Biro	32 Item	Baik
20.	Mesin Potong Rumput	1 Item	Baik
21.	AC Unit	2 Unit	Baik
22.	AC Split	7 Unit	1 Rusak Berat, 6 Baik
23.	Camera Digital	1 Unit	Baik
24.	Handy Cam	5 Unit	Baik
25.	Komputer PC	7 Unit	Baik
26.	Laptop	7 Unit	Baik
27.	Notebook	10 Unit	1 Rusak Ringan, 9 baik
28.	Printer	27 Unit	Baik
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Item	Baik
30.	Meja Kerja Pegawai non Struktural	11 Item	Baik
31.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3 Item	Baik
32.	LCD Proyektor	1 Item	Baik
33.	Kompas	10 Item	Baik

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang pada Bagian Perlengkapan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan cukup memiliki inventaris barang yang dapat menunjang kinerja pegawai dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan.



2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi sistem, prosedur dan mekanisme kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, seluruh Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. Disaat yang sama, Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi unsur pimpinan.
4. Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas dan menyusun laporan berkala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada Bupati Sintang.



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam Renstra Kementerian Pertanian yang memuat Visi terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani memiliki makna Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Sedangkan Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya. Dalam pencapaian tujuan tersebut dirumuskan Misi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

Makna yang terkandung dalam Misi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi,penyimpanan,pengolahan dan distribusi
3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat .

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat memiliki Visi yakni ” Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Adil, Makmur, Sejahtera Melalui Ketahanan Pangan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Dan Kelanjutan Serta Penyuluhan Yang Dinamis”.

Dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan yang kuat dan terpercaya.



2. Mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat secara mandiri berbasis sumber daya lokal dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan peyelenggaraan penyuluhan yang dinamis serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan rumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang komprehensif, selaras dan serasi.

Selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang melaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Guna memfokuskan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari:

- Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
- Tantangan dan kendala /ancaman, sebagai lingkungan eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisis SWOT.

Kondisi pada lingkungan internal dalam analisa SWOT diidentifikasi sebagai faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sedangkan kondisi pada lingkungan eksternal diidentifikasi sebagai faktor peluang dan faktor ancaman.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
- 2). Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan.
- 3). Jumlah Tenaga Fungsional Penyuluh dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup memadai.
- 4). Pelatihan teknis fungsional / administratif yang sering dilaksanakan.



-
- 5). Jumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai.
 - 6). Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sintang terutama yang tinggal di pedesaan hidup dari sektor pertanian baik tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan.
 - 7). Telah terbangunnya cabang-cabang usaha tani baik berupa usaha tani tanaman pangan berupa padi sawah, budidaya kolam, kawasan peternakan sapi, perkebunan kepala sawit, perkebunan karet dan kawasan hutan rakyat.

b. Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana wilayah yang kurang memadai seperti jalan dan jembatan untuk menjangkau daerah pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian
2. Perubahan iklim, kekeringan dan kerusakan lingkungan menyebabkan meningkatnya serangan hama, penyakit dan kerusakan tanaman.
3. Kurangnya ketersediaan pangan menyebabkan Kabupaten Sintang memasukkan beras dari luar Kabupaten Sintang.
4. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Petani sebagai pelaku Pembangunan di bidang pertanian.
5. Dukungan anggaran baik melalui DAU, APBD I maupun APBN belum optimal bagi terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup dibidang usaha tani tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pola usaha tani



-
2. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang terus meningkat.
 3. Ketersediaan berbagai aneka bahan pangan di Kabupaten Sintang yang cukup optimal.
 4. Potensi lahan produktif untuk pengembangan usaha Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang cukup tersedia secara memadai dan belum dioptimalkan.
 5. Pengembangan daerah khusus perbatasan dengan Negara Malaysia merupakan peluang pasar dan perdagangan produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan.

b. Ancaman (Threats)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian masih terisolir dan sulit dijangkau dengan alat transportasi.
2. Perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan karena tidak mampu memprediksi ancaman bencana terhadap tanaman.
3. Sikap keterampilan dan pengetahuan petani yang sangat rendah dalam penerapan inovasi teknologi.
4. Terpencarnya lahan usaha tani padi dan jagung tidak dalam suatu kawasan menyebabkan sulitnya pengelolaan usaha tani secara efisien
5. Usaha pertanian rakyat sebagian besar dikelola secara konvensional sehingga kurang efisien dan produktivitasnya relatif rendah.
6. Kelembagaan petani yang belum optimal dan berdayaguna .
7. Adanya Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan tanaman perkebunan, pemukiman serta kawasan lain.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke belakang, telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Kabupaten Sintang, yang sangat mungkin akan terjadi dalam lima tahun kedepan, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana produksi pertanian belum terjangkau secara optimal oleh petani
2. Penerapan teknologi budidaya belum optimal
3. Kemampuan dalam penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah
4. Masih kurangnya ketersediaan benih bersertifikat di tingkat petani
5. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil
7. Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal
8. Akses permodalan bagi petani belum merata

2.4.1. Tantangan

Penerapan Otonomi Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung telah ikut menentukan laju pembangunan pertanian.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, terdapat pergeseran yang sangat penting tentang peranan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pembinaan, pemerintah pusat berperan memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Jiwa dan makna dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya pembangunan di wilayah. Selain itu, dalam rangka otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara efektif dan efisien dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.

Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dinyatakan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pasal 9 ayat (4) urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pembinaan dan Pengembangan SDM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara dalam UU No. 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan



pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan Antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara dalam pasal 3 ayat (5) PP No. 25 Tahun 2000, salah satu kewenangan pemerintah provinsi, adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (termasuk sektor pertanian) didanai APBD, sedangkan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan didanai APBN.

Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis. Sampai saat ini mekanisme perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menerapkan penyusunan rencana kerja dan penganggaran berbasis kinerja dan belum berorientasi pada pemecahan masalah. Anggaran tidak mencukupi sehingga sistem penganggaran masih berdasarkan budget oriented, dengan keterbatasan anggaran tersebut perlu disusun program-program berdasar prioritas.

2.4.2 Peluang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mendominasi dalam pengembangan ekonomi wilayah dimana pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Sintang antara lain :

- a. Produksi sektor pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan perlu terus dipacu dengan tujuan untuk memantapkan swasembada pangan dan penganekaragaman jenis bahan makanan. Potensi Sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, oleh sebab itu padi merupakan komoditi strategis dalam konteks



pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian, Padi sebagai penghasil beras merupakan peluang investasi yang dapat diusahakan antara lain budi daya padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran serta pada penyediaan dan pengolahan pupuk organik maupun anorganik, pengembangan usaha tanaman pangan dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani. Untuk padi sawah dan padi ladang serta untuk jenis komoditi palawija yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan talas di Kabupaten Sintang dikembangkan di 14 (empat belas) Kecamatan.

- b. Potensi Perikanan yang Sangat Potensial di Kabupaten Sintang adalah Usaha Perikanan Keramba dan Budi daya Kolam Serta Perikanan Umum. Produksi Ikan Terbesar yang terdapat di kab. Sintang adalah jenis Lele, Nila, Toman, Jelawat, Tengadak/Lampan, Gurami, Semah dan Paten/Juara. Peluang investasi yang ditawarkan pada sektor perikanan adalah : Usaha Budi daya ikan Keramba dan Budi daya Ikan Kolam, penangkaran bibit ikan yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani.
- c. Potensi Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat. Dari area yang ada di Kabupaten Sintang pemanfaatan terbesar yaitu untuk pertanian lahan kering dan area penggunaan lain yaitu 38,59 persen, Taman Nasional 3,17 persen, Hutan lindung 20,65 persen, Hutan Produksi 28,82 Terbatas persen, Hutan Produksi Biasa 8,71 persen, dan Hutan Wisata 0,06 persen. Hasil perkebunan yang diutamakan untuk menunjang keperluan industri yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan Inti Rakyat dan Swadaya.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang yang sebagian besar hidup sebagai petani baik di Sektor Pertanian, perikanan, perkebunan dan perikanan. Pola usaha tani yang dilaksanakan masih dengan cara dan teknologi yang sangat sederhana, sehingga tingkat produksi dan produktifitas relatif masih rendah. Pengelolaan dan pemasaran hasil yang belum tertata dengan baik juga menyebabkan tingkat pendapatan petani masih rendah. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan inovasi teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat petani yang sejahtera melalui peningkatan pendapatan dan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai salah satu Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan ketahanan pangan dan budidaya perikanan, memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dapat disinergikan dalam memformulasikan strategi dan kebijakan teknis operasional dalam mendorong tercapainya target-target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun hal-hal yang menjadi kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1. Kekuatan (Strenght) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

- a. Adanya payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (SP3K) menjadi landasan yang kuat untuk mensinergikan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan baik pada level Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.



- b. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan biji serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang menetapkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Berdasarkan Nawacita Ketahanan pangan merupakan prioritas ke-7 yaitu akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sedangkan Trisakti pada program aksi Bidang Ekonomi merupakan prioritas ke-2 yaitu Membangun Ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan. Keberadaan tenaga penyuluh perikanan yang cukup optimal dan sebagian penyuluh senior yang telah berpengalaman sejumlah 6 orang penyuluh perikanan berstatus pegawai negeri sipil serta tenaga Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) sebanyak 3 Orang.
- c. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sintang terutama yang tinggal di pedesaan hidup dari sektor pertanian baik tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan, yang menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai penyokong utama kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang telah familiar dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Adanya perkembangan informasi mengenai teknologi disektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan yang dapat dikembangkan guna menunjang peningkatan produktivitas khususnya sektor pertanian dan perkebunan.
- e. Telah terbangunnya cabang-cabang usaha tani baik berupa usaha tani tanaman pangan berupa padi sawah, budidaya perikanan kolam, kawasan peternakan sapi, perkebunan kelapa sawit, Perkebunan Karet dan kawasan hutan rakyat serta aneka tanaman tahunan lainnya.
- f. Adanya kemampuan sumber daya penyuluh yang cukup optimal

3.1.2. Kelemahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

- a. Sarana dan prasarana wilayah yang kurang memadai seperti jalan dan jembatan untuk menjangkau daerah pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian, sehingga berdampak pada intensitas pembinaan terhadap petani, sulitnya pendistribusian sarana produksi pertanian dan biaya mobilitas yang lebih tinggi.
- b. Perubahan iklim, kekeringan dan kerusakan lingkungan menyebabkan meningkatnya serangan hama, penyakit dan kerusakan tanaman.



-
- c. Kurangnya ketersediaan pangan menyebabkan Kabupaten Sintang memasukkan beras dari luar Kabupaten Sintang.
 - d. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Petani sebagai pelaku Pembangunan di bidang pertanian, perikanan, perternakan dan perkebunan
 - e. Dukungan anggaran baik melalui DAU, APBD I maupun APBN belum optimal bagi terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

3.1.3. Peluang Badan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang

- c. Sumberdaya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup dibidang usaha tani tanaman pangan perkebunan, perikanan, perkebunan, perternakan dan pola usaha tani disekitar kawasan hutan yang sudah diusahakan oleh masyarakat Sintang secara turun temurun, namun belum memperoleh bimbingan yang optimal dan intensif.
- d. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang terus meningkat dan perlu disampaikan dan diterapkan oleh masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Ketersediaan berbagai aneka bahan pangan di Kabupaten Sintang yang cukup optimal dapat mencegah terjadinya krisis pangan dan mengurangi ketergantungan beras dari luar daerah Kabupaten Sintang.
- f. Potensi lahan produktif untuk pengembangan usaha Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang cukup tersedia secara memadai dan belum dioptimalkan.
- g. Pengembangan daerah khusus perbatasan dengan Negara Malaysia merupakan peluang pasar dan perdagangan produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan.

3.1.4. Tantangan

- a. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian masih terisolir dan sulit dijangkau dengan alat transportasi.
- b. Perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan karena tidak mampu memprediksi ancaman bencana terhadap tanaman.



- c. Sikap keterampilan dan pengetahuan petani dan pembudidaya perikanan yang sangat rendah dalam penerapan inovasi teknologi.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
- e. Usaha pertanian rakyat sebagian besar dikelola secara konvensional sehingga kurang efisien dan produktivitasnya relatif rendah.
- f. Kelembagaan petani yang belum optimal dan berdayaguna .
- g. Adanya Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan tanaman perkebunan, pemukiman serta kawasan lain menyebabkan menyusutnya luas lahan sawah dan ladang.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH KABUPATEN SINTANG.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 yakni :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang melaksanakan Visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera yang dijabarkan dalam Misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui target sasaran terjaganya lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat serta meningkatnya kemandirian masyarakat desa.

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 5	Tujuan	Sasaran
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan berbagai ragam konsumsi pola pangan masyarakat.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga

Adapun tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam kaitannya terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan inovasi teknologi pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan sebagai salah satu usaha dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan agar tercapainya tingkat kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat sehingga terwujud masyarakat petani yang sejahtera.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dan dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang merumuskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut.



Tabel. 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kurangnya ketersediaan pangan menyebabkan Kabupaten Sintang memasukkan beras dari luar Kabupaten Sintang	Kurangnya ketersediaan pangan akibat masih rendah nya tingkat produksi yang dipengaruhi faktor iklim dan ketidak mampuan memprediksi ancaman bencana tanaman	Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sintang khususnys di wilayah pedesaan yang sebagian besar adalah petani mampu mencegah terjadinya krisis pangan dan mengurangi ketergantungan beras melalui optimalisasi ketersediaan berbagai macam aneka bahan pangan
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan			
2.	Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Rendahnya efisiensi usaha tani padi yang disebabkan masih dikelola secara konvensional	Pengelolaan usaha pertanian rakyat yang sebagian besar dikelola secara konvensional serta adanya perubahan iklim, kekeringan dan kerusakan lingkungan menyebabkan tingginya serangan hama penyakit dan kerusakan tanaman sehingga kurang efisien dalam peningkatan produktivitas	Jumlah tenaga fungsional penyuluh dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup memadai dan didukung adanya potensi lahan produktif untuk pengembangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang cukup tersedia namun belum dioptimalkan
	Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan			
3.	Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan Pestisida	Kelembagaan petani yang belum optimal dan berdayaguna	Sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup di bidang usaha tani tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pola usaha tani
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani			



1	2	3	4	5
4.	Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan petani sebagai pelaku pembangunan dibidang pertanian	Sikap keterampilan dan pengetahuan petani yang masih relatif rendah dalam penerapan inovasi teknologi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang cukup memadai
	Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan			
5.	Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Sarana dan Prasarana wilayah kurang memadai seperti jalan dan jembatan untuk menjangkau daerah pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian, sehingga berdampak pada intensitas pembinaan terhadap petani, sulitnya pendistribusian sarana produksi pertanian dan biaya mobilisasi yang lebih tinggi	Kondisi Geografis Kabupaten Sintang yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian masih terisolir dan sulit dijangkau dengan alat transportasi ditunjang lagi dengan sarana dan prasarana wilayah yang kurang memadai (akses jalan dan jembatan) untuk menjangkau daerah pusat kegiatan pertanian	Pengembangan daerah khususnya daerah perbatasan yang merupakan peluang pasar dan perdagangan produksi-produksi pertanian, perikanan dan kehutanan serta terbangunnya cabang-cabang usaha tani baik berupa usaha tani tanaman pangan berupa padi sawah, budidaya kolam, kawasan peternakan, perkebunan kelapa sawit dan karet serta kawasan hutan rakyat.
	Program : Pemasaran dan Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan			

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Menurut Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat masing-masing memuat tujuan atau cita-cita yang ingin diwujudkan untuk membangun kawasannya, adapun tujuan dan cita-cita tersebut tergambar dari Visi dan Misi.

Kementerian Pertanian memiliki visi “**Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**” yang memuat makna :

- a. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
- b. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya



untuk mencapai visi tersebut Kementerian Pertanian merumuskan Misi Sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat memiliki visi yakni **"Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Adil, Makmur, Sejahtera Melalui Ketahanan Pangan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Dan Kelanjutan Serta Penyuluhan Yang Dinamis"**.

Dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan yang kuat dan terpercaya.
2. Mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat secara mandiri berbasis sumber daya lokal dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan peyelenggaraan penyuluhan yang dinamis serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan rumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang komprehensif, selaras dan serasi.

Selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang melaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menitik beratkan pada program ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan, selain itu sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan dari perwujudan cita-cita ketahanan pangan, dimana rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi,



mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian. Selain masalah sumber daya manusia faktor iklim juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani karena ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplorasi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya dengan membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Guna mewujudkan keberhasilan tujuan serta guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi akibat faktor alam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang melaksanakan program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan penyuluh lapangan dan petani, magang petani dan kunjungan lapang sebagai bahan informasi dalam penerapan inovasi pertanian serta melaksanakan kegiatan ketersediaan pangan melalui cadangan pangan, pengembangan desa mandiri dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari.



3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

RTRW Kabupaten Sintang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang seperti tantangan globalisasi, aspirasi masyarakat, keseimbangan perkembangan kawasan/kecamatan dalam wilayah kabupaten, kondisi ekologi dan fisik wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan, dampak pemanasan global, pengembangan potensi perkebunan dan pariwisata, pemanfaatan ruang kota, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, RTRW merupakan konsep terintegrasi antar sektor yang saling berkaitan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang dapat mendukung tercapainya efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah kabupaten secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang.

Tata ruang Kabupaten Sintang dengan peruntukan sebagai berikut :

5. Taman Nasional sebesar 68,603 Ha atau sebesar 3,2 %.
6. Hutan Lindung seluas 446.800 Ha atau sebesar 21 %.
7. Hutan Produksi Terbatas seluas 623,506 Ha atau sebesar 29 %.
8. Hutan Produksi Biasa seluas 188,469 Ha atau sebesar 9 %.
9. Pertanian Lahan Kering seluas 834,809 Ha atau sebesar 38 %.
10. Hutan wisata seluas 1,334 Ha atau sebesar 0.005 %.

Dari peruntukan tata ruang wilayah untuk pertanian lahan kering sebesar 38 % atau seluas 834,809 Ha merupakan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan hal ini sejalan dengan sebagian besar mata pencaharaan hampir seluruh masyarakat pedesaan Kabupaten Sintang adalah petani dengan komoditas karet dan padi yang memerlukan pembinaan dan bimbingan dari para penyuluh. Potensi peningkatan produktivitas tanaman pangan, tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dengan luas wilayah yang relatif besar memiliki tantangan tersendiri, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai serta sarana dan prasarana wilayah yang mampu menjangkau daerah yang merupakan pusat kegiatan pertanian dapat menunjang keberhasilan dari sasaran dan program yang ingin dicapai. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian yang sulit dijangkau dengan alat transportasi hal ini menyulitkan dalam pemerataan peningkatan produktivitas dan keterampilan masyarakat.



3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

- a. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan serta kesejahteraan petani sebagai akibat belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan serta pendampingan pertanian.
- b. Kesejahteraan petani masih rendah sebagai akibat inovasi penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan sistem pemasaran yang belum optimal.
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi ketahanan pangan dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan bermutu yang berbasis pada IPTEK dan sumber daya lokal.
- d. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian yang sulit dijangkau dengan alat transportasi hal ini menyulitkan dalam pemerataan peningkatan produktivitas dan keterampilan masyarakat.
- e. Potensi peningkatan produktivitas tanaman pangan, tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dengan luas wilayah yang relatif besar memiliki tantangan berupa peningkatan ketersediaannya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai serta sarana dan prasarana wilayah yang mampu menjangkau daerah yang merupakan pusat kegiatan pertanian sehingga dapat menunjang keberhasilan dari sasaran dan program yang ingin dicapai
- f. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani sebagai pelaku pembangunan di bidang pertanian yang masih relatif rendah dalam penerapan inovasi teknologi



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk di wujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan mencermati tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Sintang “

Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan secara mandiri berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang memiliki ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan untuk kurun waktu 2017-2021 adalah penyusunan perencanaan ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan, distribusi dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat pada tingkat rumah tangga dan tingkat wilayah.

Masyarakat dengan ketahanan pangan yang berkelanjutan akan dapat dicapai melalui upaya (1) Pengembangan cadangan pangan daerah, (2) Pengembangan desa mandiri pangan, dan (3) Pengembangan Diversifikasi pangan lokal.

Masyarakat Sintang yang Sejahtera melalui upaya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dicapai melalui upaya (1) peningkatan kemampuan lembaga petani, (2) penilaian petani berprestasi, (3) magang kewirausahaan petani, dan (4) kemitraan antar pelaku utama perikanan dan pelaku usaha perikanan.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yaitu :



1. Meningkatkan pemantauan dan analisa ketersediaan pangan, kerawanan pangan serta pengendalian distribusi dan keamanan pangan
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana petugas penyuluh, pelaku utama/pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan ketersediaan Informasi dan pengembangan kemitraan kerjasama.
4. Meningkatkan pengkajian teknologi tepat guna pangan dan diversifikasi pangan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan usaha Perikanan

Secara sederhana keterkaitan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang dapat digambarkan dalam bentuk Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang

Visi Kabupaten Sintang 2016-2021	Visi dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Sintang 2017-2021
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada Tahun 2021	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Sintang
Misi Kabupaten Sintang 2016-2021	Misi dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Sintang 2017-2021
1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.	
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.	
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.	2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana penyuluh, pelaku utama/pelaku usaha dan pemangku kepentingan.



4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.	
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	5.Meningkatkan dan mengembangkan usaha budidaya perikanan. 1.Meningkatkan pemantauan dan analisa ketersediaan pangan, kerawanan pangan serta pengendalian distribusi dan keamanan pangan
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	

Berdasarkan Tabel. 4.1 diatas dapat dilihat bahwa rumusan pernyataan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang yaitu pada Misi ke-1(satu) dan Misi ke-(2)dua dan misi ke-5(lima) yaitu meningkatkan sistem ketahanan pangan melalui pemantauan,pengawasan dan analisa ketersediaan pangan,kerawanan pangan serta pengendalian diistribusi keamanan pangan,Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan,sarana prasarana penyuluh perikanan,pelaku utama,pelaku usaha dan pemangku kepentingan,serta Meningkatkan dan mengembangkan usaha perikanan didalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.Dengan ke lima (5) Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran dari dinas ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam mendukung terwujudnya keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Sintang periode tahun 2016-2021.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KETAHANANPANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG

1. TUJUAN

Mengacu pada Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang seperti tersebut diatas, maka ditindaklanjuti dengan tujuan yang diinginkan sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan berbagai ragam konsumsi pola pangan masyarakat.



-
- (2) Mewujudkan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan perikanan yang profesional.
 - (3) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan ketersediaan pangan masyarakat.
 - (4) Menyediakan informasi pengendalian distribusi pangan dan kerawanan pangan
 - (5) Meningkatkan konsumsi ikan melalui budidaya perikanan dalam peningkatan Gizi mewujudkan kesejahteraan masyarakat

2. SASARAN

Sasaran merupakan indikator yang akan dilaksanakan sebagai ukuran dalam upaya mewujudkan tujuan dari Visi dan Misi yang ingin dicapai, guna mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang menentukan sasaran sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya kualitas ketahanan pangan
- (2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga
- (3) Memperkokoh kemampuan desa mandiri pangan
- (4) Diversifikasi komoditas pangan dan perluasan daerah mandiri pangan
- (5) Meningkatnya kualitas dan mutu produk keamanan pangan
- (6) Meningkatnya kemampuan petani ikan dalam pengembangan usaha perikanan
- (7) Meningkatnya budidaya perikanan lokal
- (8) Peningkatan sumberdaya penyuluh baik penyuluh PNS, swadaya dan swasta dengan dukungan sarana prasarana, dan program yang efektif.
- (9) Peningkatan penyediaan sarana prasana unit pembenihan perikanan rakyat
- (10) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- (11) Peningkatan distribusi dan akses pangan daerah

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung pelaksanaan Misi. Pernyataan Tujuan dan Sasaran dipaparkan pada satu matrik berkaitan dengan setiap misi sebagaimana tampak dalam tabel berikut :



Tabel. 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Sintang 2017-2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Sintang	Meningkatkan pemantauan dan analisa ketersediaan pangan, kerawanan pangan serta pengendalian distribusi dan keamanan pangan	Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan berbagai ragam konsumsi pola pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana petugas penyuluh perikanan, pelaku utama/pelaku usaha dan pemangku kepentingan	Meningkatkan kinerja Aparatur dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP)	1. Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menuju terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik
	Meningkatkan ketersediaan informasi dan pengembangan kemitraan kerjasama	Menyediakan informasi Ketahanan Pangan dan perikanan serta pengkajian teknologi	1. Terwujudnya layanan stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen dan konsumen
	Meningkatkan pengkajian tepat guna pangan dan diversifikasi pangan	terapan dengan kerjasama kemitraan	1. Meningkatnya kewaspadaan terhadap kerawanan pangan
	Meningkatkan dan mengembangkan usaha perikanan	Menyediakan sarana prasaran budidaya perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan 3. Meningkatkan hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Sebagai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang beserta indikator kinerjanya dapat di lihat dalam tabel 4.3 di bawah ini sebagai berikut :



Tabel. 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan berbagai ragam konsumsi pola pangan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan	1. Jumlah Desa mandiri pangan	13 Desa	13 Desa	13 Desa	14 Desa	14 Desa	
			2. Jumlah Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	
		2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga	1. Persentase pangan segar yang aman						
			2. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78,9 Skor	84,9 Skor	87,9 Skor	89,9 Skor	91,9 Skor	
			3. Jumlah Desa dengan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan masyarakat	55 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP)	3. Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	5	6	8	10	7	
			2. Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang operasional Dinas dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	7 jenis	18 jenis	18 jenis	
			3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	



			4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program kegiatan dan pelaporan	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
			5. Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah yang diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3.	Menyediakan informasi Ketahanan Pangan dan perikanan serta pengkajian teknologi terapan dengan kerjasama kemitraan	4. Terwujudnya layanan stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen dan konsumen	1. Jumlah laporan harga pasar dan produsen	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec
			2. Jumlah hasil analisis tentang harga dan pasokan secara berkala	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec
		5. Meningkatnya kewaspadaan terhadap kerawanan pangan	Jumlah laporan informasi ketahanan dan kerawanan pangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
4.	Menyediakan sarana prasarana budidaya perikanan	6. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap	911,66 Ton	741,16 Ton	894,49 Ton	1.212,97 Ton	1.242,97 Ton
			2. Jumlah produksi perikanan budidaya	1.085,77 Ton	1.488,66 Ton	894,49 Ton	1.212,65 Ton	1.242,97 Ton
		8. Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	1. Jumlah area sungai, danau, rawa, waduk dan genangan air lainnya yang dikonservasi	-	-	-	5,00 Area	5,00 Area
		7. Meningkatkan hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan	1. Jumlah produksi pengolahan hasil ikan	-	-	155,50 Ton	28,62 Ton	29,33 Ton
			2. Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun (kg/kapita/tahun)	-	26,97 kg/kapita/ tahun	30,82 kg/kapita/ tahun	38,96 kg/kapita/ tahun	39,93 kg/kapita/ tahun



4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG

Pembangunan pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Visi tersebut dijabarkan menjadi tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Berdasarkan rincian dari sembilan NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintng terdiri dari Peningkatan Kedaulatan Pangan yang merupakan agenda ke-7 (tujuh) Nawa Cita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang merumuskan pernyataan strategi dan serta arah kebijakan yang tertuang dalam tabel 4.4 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel. 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Ketahanan Pangan masyarakat KabupatenSintang			
Misi I : Meningkatkan sistem ketahanan pangan masyarakat melalui pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan serta pengendalian distribusi dan konsumsi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan berbagai ragam konsumsi pola pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cadangan pangan masyarakat 2. Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan dan gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi berbasis sumber daya lokal (desa) 2.Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal



Misi II : Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana petugas penyuluh perikanan, pelaku utama/pelaku usaha dan pemangku kepentingan			
Meningkatkan kinerja aparaturnya dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP)	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan sumber daya aparaturnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan keterampilan teknis Aparatur melalui peningkatan sarana dan prasarana	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparaturnya, sarana dan prasarana
Misi III : Meningkatkan pengembangan ketersediaan informasi dan pengembangan kemitraan kerjasama			
Menyediakan informasi Ketahanan pangan dan perikanan serta pengkajian teknologi terapan dengan kerjasama kemitraan	Terwujudnya layanan stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen dan konsumen	1. Menyebarkan informasi teknologi tepat guna di bidang usaha tani tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan	1. Menyediakan informasi yang dapat mengakses modal, teknologi dan sistem informasi pasar guna meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan wawasan bisnis bagi pelaku usaha
Misi IV : Meningkatkan Pengkajian teknologi tepat guna pangan dan diversifikasi Pangan			
Menyediakan informasi Ketahanan Pangan dan perikanan, serta pengkajian teknologi terapan dengan kerjasama kemitraan	Meningkatnya kewaspadaan terhadap kerawanan pangan	1. Menerapkan teknologi tepat guna dalam peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan diversifikasi pangan	1. Menyediakan pengkajian teknologi tepat guna pangan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan diversifikasi pangan
Misi V : Meningkatkan dan Mengembangkan usaha Perikanan didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Menyediakan sarana prasarana budidaya perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan Meningkatkan hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan 	.Peningkatan pengembangan budidaya perikanan lokal	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal Meningkatkan pengawasan sumber daya perikanan Mengembangkan tempat pembenihan ikan sebagai unit percontohan

Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran maka diperlukan strategi dan kebijakan yang merupakan langkah-langkah operasional. Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang yang tergambar pada tabel diatas adalah :



4.3.1. STRATEGI

Strategi pembenahan ke dalam (*inward looking strategy*) yaitu suatu cara yang ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai institusi koordinasi penyuluhan dengan menghimpun, mengelola dan mengaktualisasi kapasitas dalam menghasilkan rencana pembangunan yang partisipatif, berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi ini meliputi percepatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, membangun sistem organisasi yang tangguh, pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal serta membangun sistem data dan informasi yang tangguh dan akuntabel sebagai input bidang pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang.

Strategi pembenahan ke luar (*outward looking strategy*) suatu cara yang ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai institusi yang memiliki kewenangan di bidang penyuluhan dengan memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi terhadap peluang dan tantangan yang ada dalam lingkungan eksternal sehingga dapat menghasilkan rencana pembangunan yang partisipatif, berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi ini meliputi pemetaan menyeluruh lingkungan eksternal yang ada, mendorong kemitraan dan jaringan kerja antar stakeholders serta membangun citra diri yang positif dibidang pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

4.3.2. KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang tersebut, maka kebijakan yang ditempuh sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi berbasiskan sumber daya lokal
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
4. Menyediakan informasi yang dapat mengakses modal, teknologi dan sistem informasi pasar guna meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan wawasan bisnis bagi pelaku usaha
5. Menyediakan pengkajian teknologi tepat guna pangan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan diversifikasi pangan



-
6. Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal
 7. Mengembangkan tempat pembenihan ikan sebagai unit percontohan
 8. Meningkatkan pengawasan sumber daya perikanan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sebagai pedoman umum dibuat suatu arah kebijakan pembangunan pertanian yang meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui eksestensifikasi, intensifikasi, diversifikasi berbasiskan sumber daya lokal
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
4. Menyediakan informasi yang dapat mengakses modal, teknologi dan sistem informasi pasar guna meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan wawasan bisnis bagi pelaku usaha
5. Menyediakan pengkajian teknologi tepat guna pangan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan diversifikasi pangan
6. Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal
7. Mengembangkan tempat pembenihan ikan sebagai unit percontohan
8. Meningkatkan pengawasan sumber daya perikanan

Dengan berpedoman kepada arah dan kebijakan tersebut diatas maka dibuatlah Rencana Strategi untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Peningkatan cadangan pangan masyarakat
2. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi
3. Peningkatan keterampilan teknis aparatur melalui peningkatan sarana dan Prasarana
4. Menyebarkan informasi teknologi tepat guna di bidang usaha tani tanaman pangan, perkebunan, perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
5. Menerapkan teknologi tepat guna dalam peningkatan kewaspadaan terhadap perawanan pangan dan diversifikasi pangan
6. Peningkatan pengembangan budidaya perikanan lokal



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Dari perencanaan strategi tersebut dituangkan ke dalam program pembangunan. Program Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian yang mempunyai daya saing, tangguh dan berbasis sumberdaya lokal, melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi untuk memperluas kesempatan usaha dan peluang kerja.

Mencermati permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 serta mengantisipasi berbagai permasalahan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang akan muncul, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyusun Prioritas Program dan Kegiatan sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
4. Peringatan Hari Besar Nasional
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
6. Penyediaan ATK
7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Kegiatan Pameran Pembangunan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.



-
15. Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah
 16. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh
 17. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pembangunan Ruang Pertemuan/Ruang Rapat Kantor
3. Pembangunan /Rehabilitas Pagar Kantor
4. Pembangunan /Penataan Halaman Kantor
5. Pengadaan Mobil Jabatan (Roda 4)
6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Air/speed Boat
7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2 untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staff)
8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
10. Pengadaan Meubeleur
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Olah Raga/Traning
2. Pengadaan Pakaian Dinas
3. Pengadaan PSL Pejabat Eselon II
4. Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III
5. Pengadaan PSH Pejabat Eselon II dan III
6. Pengadaan pakaian batik daerah dan nasional

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan & Pelatihan Formal
2. Sistem Aplikasi Data dan Informasi Ketahanan Pangan dan Perikanan
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Latihan Dasar
5. Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Alih Jenjang



6. Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan LAKIP SKPD
5. Penyusunan Renja SKPD
6. Penyusunan Renstra SKPD
7. Penyusunan Laporan Tahunan SKPD

B. Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan meliputi :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Apresiasi Ketersediaan Pangan
2. Pertermuan Tenis Pedampingan Lumbung Pangan Masyarakat
3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Skor Pola Pangan
4. Pembinaan dan Pemantapan Situasi Ketersediaan Pangan
5. Pemantauan Cadangan Pangan Daerah
6. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
7. Analisis Ketersediaan Pangan
8. Koodinasi Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan
9. Koodinasi dan Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan
10. Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat
11. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
12. Peringatan Hari Krida dan Hari Pangan Sedunia
13. Pengadaan Buletin Ketahanan Pangan
14. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
15. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
16. Sosialisasi Program Desa Mandiri Pangan
17. Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
18. Pengendalian Daerah Rawan Pangan
19. Pendampingan Program Mandiri Pangan
20. Penyusunan Peta Rawan Pangan dan Gizi
21. Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan



22. Penyusunan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) Survei Rumah Tangga (SRT)

23. Pembinaan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

b. Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan

1. Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Distribusi Pangan
2. Penyusunan Peta Distribusi
3. Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Pedesaan
4. Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan
5. Pengembangan Jaringan Informasi Ketersediaan Pangan Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

c. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan
2. Koordinasi, Sosialisasi Apresiasi Mutu Pangan dan Gizi
3. Pembinaan Sekolah Sehat
4. Demplot Pangan Organic/ Keamanan Pangan
5. Pembinaan dan Pemantauan Preferensi Pangan Masyarakat

b. Program Pengembangan Otoritas Keamanan Pangan Daerah

1. Sertifikasi dan Pelabelan Produk Segar Organic
2. Uji Residu Pestisida/Kimia Pangan Olahan Masyarakat
3. Pelatihan Inspektur Pengolahan Pangan

c. Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

1. Pemberdayaan Ekonomi dan Gizi Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Lahan Perkarangan
2. Penyusunan Pola Menu Sehat Berdasarkan Potensi Wilayah
3. Diversifikasi Pangan Olahan
4. Koordinasi dan Pembinaan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
5. Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman (B2SA)

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan
3. Pengembangan Sarana dan Prasaran Pembenihan BBI Lokal
4. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pembudidaya Ikan
5. Pengadaan Sarana/Prasarana PBI
6. Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kelompok Rumah Tangga



-
7. Pengembangan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pembenihan
 8. Pengembangan Budidaya Perikanan(P2EMAS)
 9. Pengembangan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Deras
 10. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
- e. Program Pengembangan Ikan Tangkap**
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Penyediaan Data Statistik Untuk Perikanan Tangkap
 3. Pelestarian dan Pembinaan Potensi Sumber Daya Ikan
 4. Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir Nelayan
- f. Program Pengembangan Usaha Perikanan**
1. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Usaha Perikanan
 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan
 3. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Laut, Payau dan Air Tawar
 4. Pembinaan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan
- g. Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan**
1. Penyediaan Sarana/Prasarana Penyuluh Perikanan
- h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**
1. Kemitraan Antar Pelaku Utama Perikanan dan Pelaku Usaha Perikanan
 2. Pengadaan Sarana/Prasarana Pengelolaan Ikan
 3. Pengembangan Sarana/Prasarana Pemasaran Perikanan
 4. Pengembangan dan Peningkatan Komsumsi Ikan melalui lomba masak berbahan Utama Ikan



TABEL 5.1

MATRIK PENETAPAN KINERJA RENSTRA						
N O	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
			Uraian	Target	Uraian	Target
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG						
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat SKPD	Jumlah Materai	2.148 Surat	% penyediaan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tupoksi	80%
			Jumlah surat kilat khusus lokal kota/kabupaten yang disediakan	174 kg		
			Jumlah Buku cek	30 buah		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah pemakaian jasa komunikasi/telepon	72 bulan	% Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	100%
			Jumlah pemakaian jasa sumber daya air	72 bulan		
			Jumlah pemakaian jasa listrik	72 bulan		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional	Terwujudnya Kendaraan Operasional yang terpelihara dan dilengkapi ijin dan terbayarnya pajak	Jumlah Kendaraan roda 4 yang memiliki STNK dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan	15 unit	% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional	90%
			Jumlah kendaraan roda 2 yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan	687 unit		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan yang disediakan	114 jenis	% Penyediaan bahan dan tenaga kebersihan yang diperlukan	100%
			Jumlah tenaga kebersihan	54 orang		
5	Penyediaan ATK	Tersedianya alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis kantor	384 jenis	% Penyediaan ATK	95%
6	Penyediaan barang cetakan & pengadaan	Tersedianya barang cetakan & pengadaan.	Jumlah barang cetakan	36 jenis	% Penyediaan barang cetakan & pengadaan	90%
			Jumlah Peggandaan	246.756 lembar		
			Jumlah Penjilidan	210 buku		
			Jumlah Jasa Pengumuman Massa	12 kali		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	60 jenis	% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%
			Jumlah pemasangan instalasi listrik	4 paket		
			Jumlah Pemeliharaan jaringan instalasi listrik	8 unit		



8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar	18 jenis	% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95%
			Jumlah majalah	6 jenis		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan & minuman	Jumlah makanan dan minuman	7800 kotak	% Penyediaan makanan dan minuman	100%
			Jumlah Snack yang disediakan	7800 kotak		
10	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah.	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah Kabupaten dan Provinsi.	192 kali	% Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah.	95%
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	6 Orang	% Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.	100%
12	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah THL-TB	138 orang	% Tersedianya Jasa pelayanan administrasi perkantoran	100%
13	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional	Jumlah Barang yang disediakan	30 jenis	% Terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional	90%
			jumlah spanduk yang disediakan	600 meter		
			jumlah umbul-umbul yang disediakan	60 buah		
14	Pameran Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	6 kali	% Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan	95%
15	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah	Jumlah kunjungan kedalam daerah	837 Kali	% Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah	95%
16	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas	Jumlah Solar	12000 liter	% Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas	90%
			Jumlah Pertamina	15000 liter		
17	Penilaian Angka Kredit Penyuluh	Tersedianya data kenaikan pangkat penyuluh	Jumlah Penilaian terhadap penyuluh	6 Kali	% Tersedianya data kenaikan pangkat penyuluh	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR					
1	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 unit	% Terlaksananya pembangunan gedung kantor	95%
2	Pembangunan Ruang Pertemuan/ruang rapat	Terlaksananya Pembangunan Ruang Pertemuan	Jumlah Ruang Pertemuan	1 Unit	% Terlaksananya Pembangunan Ruang Pertemuan	95%
3	Pembelian Mobil Jabatan	Tersedianya kendaran mobil jabatan	Jumlah kendaran mobil jabatan	2 unit	% Tersedianya kendaran mobil jabatan	100%
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	20 Unit	% Tersedianya kendaraan dinas/operasional	80%
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC yang tersedia	12 unit	% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	90%
			mesin absensi yang tersedia			
			jumlah filling kabinet yang tersedia			



6	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	jumlah meja kerja	132 unit	% Pengadaan Mebeleur	90%
			Jumlah kursi kerja	234 unit		
			Jumlah lemari	42 unit		
7	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah GPS	7 unit	% Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	95%
			Jumlah Sound System	7 unit		
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpiliharaan bangunan gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	6 unit	% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	95%
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpiliharnya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	12 Unit	%Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	90%
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpiliharnya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	61 Unit	% Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	95%
11	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersedianya Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah printer	16 unit	% Tersedianya Perangkat Komputer dan Printer	90%
			jumlah laptop	15 unit		
			jumlah komputer PC	15 unit		
12	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah Komputer yang tersedia	5 Unit	% Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	95%
			Jumlah Printer yang tersedia	5unit		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas sipil harian Pemda	Jumlah pakaian dinas sipil harian Pemda	85 stell	% Tersedianya pakaian dinas sipil harian Pemda	90%
2	Pengadaan Pakaian Training	Tersedianya Pengadaan Pakaian Training	Jumlah Pakaian Training	65 stell	% Tersedianya Pengadaan Pakaian Training	90%
3	Pengadaan PSL Pejabat Eselon II	Tersedianya Pengadaan PSL Pejabat Eselon II	Jumlah Pengadaan PSL Pejabat Eselon II	1 stell	% Tersedianya Pengadaan PSL Pejabat Eselon II	100%
4	Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III	Tersedianya Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III	Jumlah Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III	6 buah	% Tersedianya Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III	100%
5	Pengadaan PSH Pejabat Eselon II dan III	Tersedianya Pengadaan PSH Pejabat Eselon III	Jumlah Pengadaan PSH Pejabat Eselon III	4 buah	% Tersedianya Pengadaan PSH Pejabat Eselon III	100%
6	Pengadaan pakaian batik nasional dan daerah	tersedianya pakaian batik nasional dan daerah	Jumlah pakaian batik nasional dan daerah	168 stell	% tersedianya pakaian batik nasional dan daerah	90%
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR					
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan & pelatihan formal pegawai BP4KKP	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	42 orang	rasio peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tufoksi	75%
2	Sistem Aplikasi Data informasi Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tersedianya sistem aplikasi data ketahanan pangan dan perikanan	Jumlah sistem aplikasi data ketahanan pangan dan perikanan	5 Unit	% Tersedianya sistem aplikasi data base pelaksana penyuluhan	70%
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-	35 kali	% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-	80%



				Undangan		Undangan	
	4	Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Latihan Dasar	Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan penyuluh tentang penyelenggaraan penyuluhan	Jumlah Penyuluh yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Latihan Dasar	12 PNS	% Penyuluh yang ikut Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Latihan Dasar	90%
	5	Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Alih Jenjang	Terwujudnya Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Alih Jenjang	Jumlah penyuluh yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Alih Jenjang	400 PNS	% penyuluh yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Alih Jenjang	95%
	6	Pendidikan Afirmasi Penyuluh Pertanian di STTP					
	7	Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 PNS	% peserta yang mengikuti latihan formal teknis fungsional bimtek implementasi Peraturan-Undangan	75%
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	% Peningkatan realisasi laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80%
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan Keuangan Semester	Jumlah dokumen	11 Dokumen	% Peningkatan realisasi laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80%
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran.	Jumlah dokumen	5 Dokumen	% Peningkatan realisasi laporan prognosis realisasi anggaran.	80%
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen	6 Dokumen	% Peningkatan realisasi laporan keuangan akhir tahun	80%
	5	Penyusunan LAKIP SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP SKPD	Jumlah dokumen	6 Dokumen	% Peningkatan realisasi Penyusunan LAKIP SKPD	80%
	6	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renja SKPD.	Jumlah dokumen	5 Dokumen	% Peningkatan realisasi Dokumen Renja SKPD	80%
	7	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	% Peningkatan realisasi Penyusunan Renstra SKPD	80%
	8	Laporan Tahunan SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	% Peningkatan realisasi laporan tahun SKPD	80%
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN						
	1	Apresiasi Ketersediaan Pangan	Terlaksananya jumlah apresiasi ketersediaan pangan	jumlah apresiasi ketersediaan pangan	1 Tahun	Terlaksananya jumlah apresiasi ketersediaan pangan	1 Tahun
	2	Pertemuan Teknis Pedamping Lumbung Pangan Masyarakat	Terlaksananya Jumlah pertemuan teknis lumbung pangan	Jumlah pertemuan teknis lumbung pangan	8 kali	Terlaksananya Jumlah pertemuan teknis lumbung pangan	8 kali
	3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Skor Pola Pangan	Tersusun nya jumlah neraca bahan makan	jumlah neraca bahan makan	5 dokumen	Tersusun nya jumlah neraca bahan makan	5 dokumen



		Harapan					
	4	Pembinaan dan Pemantapan situasi Ketersediaan Pangan	Terlaksananya jumlah pembinaan situasi ketersediaan pangan	jumlah pembinaan situasi ketersediaan pangan	4 kali	Terlaksananya jumlah pembinaan situasi ketersediaan pangan	4 kali
	5	Pemantauan Cadangan Pangan Daerah	terlaksananya Jumlah pemantauan cadangan pangan daerah	Jumlah pemantauan cadangan pangan daerah	5 kali	terlaksananya Jumlah pemantauan cadangan pangan daerah	5 kali
	6	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	meningkatnya Jumlah Cadangan pangan kabupaten	Jumlah Cadangan pangan kabupaten	269.850/ kg	meningkatnya Jumlah Cadangan pangan kabupaten	269.850/ kg
	7	Analisis Ketersediaan Pangan	tersedianya Jumlah laporan ketersediaan Pangan	Jumlah laporan ketersediaan Pangan	16kali	tersedianya Jumlah laporan ketersediaan Pangan	16kali
	8	Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan	terlaksananya Jumlah koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan	Jumlah koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan	8kali	terlaksananya Jumlah koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan	8kali
	9	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya jumlah koordinasi dan fasilitas dewan ketahanan pangan	Terlaksananya jumlah koordinasi dan fasilitas dewan ketahanan pangan	10kali	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	10kali
	10	Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat	Tersedianya jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat	Tersedianya jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat	19desa	Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat	19desa
	11	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	meningkatnya Jumlah lumbung desa yang dikembangkan	Jumlah lumbung desa yang dikembangkan	18 desa	meningkatnya Jumlah lumbung desa yang dikembangkan	18 desa
	12	Peringatan Hari Krida dan Hari Pangan Sedunia	terlaksananya Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	5kali	terlaksananya Jumlah pameran yang diikuti	5kali
	13	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan ketersediaan dan Distribusi pangan	Tersedianya Jumlah laporan ketersediaan dan distribusi pangan	Tersedianya Jumlah laporan ketersediaan dan distribusi pangan	14 Kec	Tersedianya Jumlah laporan ketersediaan dan distribusi pangan	14 Kec
	14	Sosialisasi Program Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Sosialisasi Program Desa Mandiri Pangan	Jumlah kecamatan dan desa	15desa	Terlaksananya Sosialisasi Program Desa Mandiri Pangan	15desa
	15	Pembinaan dan Pengembanagan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembanagan Desa Mandiri Pangan	jumlah desa jadi pengembanagan desa mandiri	15desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembanagan Desa Mandiri Pangan	15desa
	16	Pengendalian Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya pengendalian kecamatan dan desa	Jumlah kecamatan dan desa	12kecamatan	Terlaksananya pengendalian kecamatan dan desa	12kecamatan
	17	Pendampingan Program Mandiri Pangan	Terlaksananya pedamping program Mandiri pangan	Jumlah pedamping program Mandiri pangan	4kali	Terlaksananya pedamping program Mandiri pangan	4kali
	18	Penyusunan peta Rawan Pangan dan Gizi	Terlaksananya peta rawan pangan dan gizi	Jumlah peta rawan pangan dan gizi	4kali	Terlaksananya peta rawan pangan dan gizi	4kali
	19	Penyusunan data dasar rumah tangga (DDRT)Survei rumah tangga(SRT)	Terlaksananya penyusunan data dasar rumah tangga	Jumlah penyusunan data dasar rumah tangga	5laporan	Terlaksananya penyusunan data dasar rumah tangga	5laporan
	20	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya pengembangan kecamatan dan desa mandiri pangan	Jumlah kecamatan dan desa mandiri pangan	15desa	Terlaksananya pengembangan kecamatan dan desa mandiri pangan	15desa
	21	Pembinaan dan Analisis sistem kewaspadaan	Terlaksananya analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi	5kali	Terlaksananya analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi	5kali



		Pangan dan gizi					
7	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN						
	1	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Distribusi Pangan	Terlaksananya koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan	Jumlah koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan	8kali	Terlaksananya koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan	8kali
	2	Penyusunan Peta Distribusi	Terlaksananya penyusunan peta distribusi pangaan	Jumlah peta distribusi pangaan	4kali	Terlaksananya penyusunan peta distribusi pangaan	4kali
	3	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Pedesaan	Terlaksananya pengembangan Usaha lembaga distribusi Pangan Pedesaan	Jumlah pengembangan Usaha lembaga distribusi Pangan Pedesaan	8lembaga	Terlaksananya pengembangan Usaha lembaga distribusi Pangan Pedesaan	8lembaga
	4	Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan distribusi pangan	Jumlah koordinasi dan pemantauan distribusi pangan	10kali	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan distribusi pangan	10kali
	5	Pegembangan Jaringan Informasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Terlaksananya pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan	Jumlah jaringan informasi ketersediaan pangan	4kali	Terlaksananya pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan	4kali
8	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						
	1	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	10kali	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	10kali
	2	Koordinasi, sosialisasi apresiasi mutu Pangan dan gizi	Terlaksananya sosialisasi mutu pangan dan gizi	Jumlah sosialisasi mutu pangan dan gizi	15desa	Terlaksananya sosialisasi mutu pangan dan gizi	100%
	3	Pembinaan Sekolah Sehat	Terlaksananya pembinaan sekolah sehat	Jumlah sekolah sehat	15sekolah	Terlaksananya pembinaan sekolah sehat	15sekolah
	4	Demplot Pangan Organic/Keamanan Pangan	Terlaksananya demplot pangan organic	Jumlah demplot pangan organic	26kali	Terlaksananya demplot pangan organic	26kali
	5	Pembinaan dan Pemantauan Preferensi Pangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan preferensi pangan masyarakat	Jumlah pembinaan dan pemantauan preferensi pangan masyarakat	8kali	Jumlah pembinaan dan pemantauan preferensi pangan masyarakat	8kali
9	PROGRAM PENGEMBANGAN OTORITAS KEAMANAN PANGAN DAERAH						
	1	Sertifikasi dan Pelabelan produk Segar Organic	Terlaksananya sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar organic	Jumlah sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar organic	20sertifikasi	Terlaksananya sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar organic	20sertifikasi
	2	Uji Residu Pestisida/Kimia Pangan Olahan Masyarakat	meningkatnya jumlah uji residu pestisida	jumlah uji residu pestisida	15unit	meningkatnya jumlah uji residu pestisida	15unit
	3	Pelatihan Inspektur Pengolahan Pangan	terlaksananya pelatihan inpektur pengolahan makanan	jumlah pelatihan inpektur pengolahan makanan	8ali	terlaksananya pelatihan inpektur pengolahan makanan	8ali

10. PROGRAM PERCEPATAN DIVESIFIKASI KOMSUMEN PANGAN



1	Pemberdayaan Ekonomi dan Gizi Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Lahan Perkarangan	meningkatnya jumlah perdayaan ekonomi dan	jumlah pemberdayaan ekonomi dan gizi	5paket	meningkatnya jumlah pemberdayaan ekonomi dan gizi	5paket
2	Penyusunan Pola Menu Sehat Berdasarkan Potensi Wilayah	tersedianya jumlah laporan pola menu sehat	jumlah laporan pola menu sehat	5paket	tersedianya jumlah laporan pola menu sehat	100%
3	Diversifikasi Pangan Olahan	tersedianya jumlah diversifikasi pangan olahan	jumlah diversifikasi pangan olahan	4keg	tersedianya jumlah diversifikasi pangan olahan	4keg
4	Koordinasi dan Pembinaan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	tersedianya koordinasi dan pembinaan percepatan diverfikasi komsumsi pangan	jumlah koordinasi dan pembinaan percepatan diverfikasi komsumsi pangan	16kali	tersedianya koordinasi dan pembinaan percepatan diverfikasi komsumsi pangan	16kali%
5	Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman (B2SA)	terlaksananya jumlah gerakan makan beragam, bergizi, berimbang dan Aman	jumlah gerakan makan beragam, bergizi, berimbang dan Aman	30org/usaha	terlaksananya jumlah gerakan makan beragam, bergizi, berimbang dan Aman	30org/usaha

URUSAN KELAUATAN DAN PERIKANAN						
11. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN						
1	Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	meningkatnya jumlah sarana prasana pembangunan perikanan budidaya	jumlah sarana prasana pembangunan perikanan budidaya	5paket	meningkatnya jumlah sarana prasana pembangunan perikanan budidaya	5paket
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Perikanan Pembudidaya ikan	meningkatnya jumlah sarana prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat	jumlah sarana prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat	5paket	meningkatnya jumlah sarana prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat	5paket
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan BBI Lokal	meningkatnya jumlah pengembangan pembenihan BBI lokal	jumlah pengembangan pembenihan BBI lokal	4keg	meningkatnya jumlah pengembangan pembenihan BBI lokal	4keg
4	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pembudidaya Ikan	terlaksananya jumlah Bimtek Pembudidaya Ikan	jumlah Bimtek Pembudidaya Ikan	12kali	terlaksananya jumlah Bimtek Pembudidaya Ikan	12kali
5	Pengadaan Sarana / Prasarana PBI	meningkatnya jumlah pengembangan pembenihan PBI	jumlah pengembangan pembenihan PBI	10paket	meningkatnya jumlah pengembangan pembenihan PBI	10paket
6	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) kelompok rumah tangga	meningkatnya jumlah pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR)	jumlah pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR)	10paket	meningkatnya jumlah pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR)	10paket
7	Pengembangan/ Rehabilitas sarana dan prasarana Pembenihan	meningkatnya jumlah pengembangan sarana prasaran pembenihan	jumlah pengembangan sarana prasaran pembenihan	10paket	meningkatnya jumlah pengembangan sarana prasaran pembenihan	10paket
12. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP						
1	Penyediaan sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap	150unit	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	150unit
2	Penyediaan Data Statistik Untuk Perikanan Tangkap	Tersedianya data Statistik perikanan tangkap	jumlah data Statistik perikanan tangkap	4dok	Tersedianya data Statistik perikanan tangkap	4dok
3	Pelestarian dan Pembinaan Potensi Sumber Daya Ikan	Terlaksananya pelestarian potensi sumberdaya ikan	Jumlah pelestarian potensi sumberdaya ikan	4keg	Terlaksananya pelestarian	4keg



					potensi sumberdaya ikan	
4	Pembangunan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya jumlah sarana/prasarana tempat pelelangan ikan	jumlah sarana/prasarana tempat pelelangan ikan(TPI)	4paket	Meningkatnya jumlah sarana/prasarana tempat pelelangan ikan	4paket
5	Pengadaan sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir Nelayan	Terlaksananya sarana/prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat	Tersedianya jumlah sarana/prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat	6 unit	Terlaksananya sarana/prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat	6 unit
13. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN						
1	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Usaha Perikanan	Terlaksananya jumlah bimtek usaha perikanan	jumlah bimtek usaha perikanan	16kali	Terlaksananya jumlah bimtek usaha perikanan	16kali
2	Pengembangan sarana dan prasarana Usaha Perikanan	meningkatkan jumlah pengembangan saranaprasaran usaha perikanan	jumlah pengembangan saranaprasaran usaha perikanan	8paket	meningkatkan jumlah pengembangan saranaprasaran usaha perikanan	8paket
3	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan laut, payau, dan air tawar	meningkatkan Jumlah pengembangan kawasan budidaya perikanan	Jumlah pengembangan kawasan budidaya perikanan	4keg	meningkatkan Jumlah pengembangan kawasan budidaya perikanan	4keg
4	Pembinaan dan peningkatan nilai tambah Produk Perikanan	terlaksananya Jumlah pembinaan peningkatan nilai tambah produk perikanan	Jumlah pembinaan peningkatan nilai tambah produk perikanan	4paket	terlaksananya Jumlah pembinaan peningkatan nilai tambah produk perikanan	4paket
14. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUH PERIKANAN						
1	Penyediaan Sarana/Prasarana Penyuluh Perikanan	Tersedianya sarana prasarana penyuluh	Jumlah sarana prasarana penyuluh	3unit	Tersedianya sarana prasarana penyuluh	3unit
15. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN						
1	Kemitraan Antar Pelaku Utama Perikanan dan Pelaku Usaha Perikanan	Terlaksananya kegiatan kelompok mitra untuk menunjang peningkatan produksi perikanan	Jumlah kelompok mitra yang ada	15pelaku usaha	%Terlaksananya kegiatan kelompok mitra untuk menunjang peningkatan produksi perikanan	15pelaku usaha
2	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengolahan Ikan	Tersedianyaa sarana prasarana pengolahan ikan	jumlah sarana prasarana pengolahan ikan	10paket	Tersedianyaa sarana prasarana pengolahan ikan	10paket
3	Pengembangan Sarana/Prasarana Pemasaran Perikanan	Tersedianya sarana prasarana pemasaran perikanan	jumlah sarana prasarana pemasaran perikanan	10paket	Tersedianya sarana prasarana pemasaran perikanan	10paket

5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI



INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA SKPD

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dan dibantu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang yang dipertanggung jawabkan kepada Bupati Sintang;
- (2) Seluruh Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sintang agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2017-2021 dengan sebaik-baiknya;
- (3) Setiap Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang disusun dengan berpedoman Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (4) Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- (5) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);



- (6) Dalam pelaksanaan Rensta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Sintang, Instansi vertikal di Kabupaten Sintang, maupun masyarakat sipil;
- (7) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Kepala Bidang melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (8) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sintang dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, maka berbagai strategi, kebijakan, dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sintang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

6.2. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TRANSISI

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sintang untuk masa bakti 2017-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Berikut adalah rancangan program transisi untuk Tahun 2021.

Tabel 6.1.
Program Utama Transisi

No	Program Utama	Sasaran	Indikator
----	---------------	---------	-----------



No	Program Utama	Sasaran	Indikator
1	Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi pangan	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga	1. Persentase pangan segar yang aman 2. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 3. Jumlah Desa dengan percepatan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemberdayaan masyarakat

Adapun kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tertuang dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(4)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	1. Jumlah Desa mandiri pangan		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
	2. Jumlah Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)		14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec
	1. Persentase pangan segar yang aman		100	100	100	100	100	100
	2. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		84,9 Skor	87,9 Skor	89,9 Skor	91,9 Skor	91,9 Skor	91,9
	3. Jumlah Desa dengan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan masyarakat		15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15
2	1. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat		6	8	10	7	7	7



	2. Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang operasional Dinas dan perlengkapan kantor		6 jenis	7 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis	18
	3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor		3 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4
	4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program kegiatan dan pelaporan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	5. Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah yang diikuti		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3.	1. Jumlah laporan harga pasar dan produsen		14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14
	2. Jumlah hasil analisi tentang harga dan pasokan secara berkala		14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14
	Jumlah laporan informasi ketahanan dan kerawanan pangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12
4.	1. Jumlah produksi perikanan tangkap		741,16 Ton	894,49 Ton	1.212,97 Ton	1.242,97 Ton	1.242,97 Ton	1.242,97
	2. Jumlah produksi perikanan budidaya		1.488,66 Ton	894,49 Ton	1.212,65 Ton	1.242,97 Ton	1.242,97 Ton	1.242,97 Ton
	1. Jumlah area sungai, danau, rawa, waduk dan genangan air lainnya yang dikonservasi		-	-	5,00 Area	5,00 Area	5,00 Area	5,00 Area
	1. Jumlah produksi							



	pengolahan hasil ikan		-	15,50 Ton	28,62 Ton	29,33 Ton	29,33 Ton	29,33
	2. Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun (kg/kapita/ tahun)		26,97 kg/kapita/ tahun	30,82 kg/kapita/ tahun	38,96 kg/kapita/ tahun	39,93 kg/kapita/ tahun	39,93 kg/kapita/ tahun	39,33



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada dasarnya untuk dijadikan acuan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan selama lima tahun kedepan (2017 – 2021), dimana pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas manusia secara utuh dan merata, mengembangkan sarana dan prasarana, mengembangkan IPTEK yang spesifikasi lokasi dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dan memacu kemandirian, serta meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal.

Walaupun masih banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan tetapi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan untuk dijadikan dan diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan.

Sintang, April 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Dan Perikanan
Kabupaten Sintang,



Ir.H. ZULKARNAEN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611107 199303 006

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	ANGGARAN TENTATIF (Rp.)														Kondisi Kinerja pada periode Renstra S		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Mewujudkan Ketahanan Masyarakat dengan berbagai ragam konsumsi pola pangan masyarakat	Meningkatnya kualitas Ketahanan Pangan	Tersedianya Desa Mandiri Pangan	0203.020301.16	1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Jumlah apresiasi ketersediaan pangan	1kali			1 kali	70.000.000,00	1 kali	70.000.000,00	1 kali	70.000.000,00	1 kali	70.000.000,00	1 kali	70.000.000,00	1 Tahun	350.000,00			
	Meningkatnya pemerataan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga	Tersedianya data analisis Neraca Bahan Makanan (NBSM)		Tersedianya pangan segar masyarakat yang aman	1 Apresiasi Ketersediaan Pangan	Jumlah pertemuan teknis lumbung pangan masyarakat	2kali			1 kali	70.000.000,00	2kali	80.000.000,00	1kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	8 kali	320.000,00
3 Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Skor Pola					Jumlah neraca bahan makan	1 dokumen			1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	5	240.000,00	
4 Pembinaan dan Pemantapan situasi Ketersediaan Pangan					Jumlah pembinaan situasi ketersediaan pangan	1kali			1kali	70.000.000,00	1kali	70.000.000,00	1kali	70.000.000,00	1kali	70.000.000,00	1kali	70.000.000,00	1kali	70.000.000,00	4 kali	280.000,00	
5 Pemantauan Cadangan Pangan Daerah					Jumlah pemantauan cadangan pangan	1kali			1kali	50.000.000,00	1kali	50.000.000,00	1kali	50.000.000,00	1kali	50.000.000,00	1kali	50.000.000,00	1kali	50.000.000,00	5 kali	250.000,00	
6 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten					Jumlah Cadangan pangan kabupaten	44.850Kg			44.850Kg	500.000.000,00	50.000kg	500.000.000,00	60.000kg	600.000.000,00	65.000kg	650.000.000,00	60.000kg	600.000.000,00	50.000kg	500.000.000,00	5 kali	269.850/kg	2.750.000,00
7 Analisis Ketersediaan Pangan					Jumlah laporan ketersediaan Pangan	4kali			4kali	80.000.000,00	4kali	80.000.000,00	4kali	80.000.000,00	4kali	80.000.000,00	4kali	80.000.000,00	4kali	80.000.000,00	16kali	640.000,00	240.000,00
8 Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan					Jumlah koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan	2kali			2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	8kali	320.000,00	300.000,00
9 Koordinasi dan Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan					Jumlah koordinasi dan fasilitas dewan	2kali			2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	2kali	75.000.000,00	10kali	400.000,00	375.000,00
10 Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat					Jumlah pembinaan lumbung pangan	3desa			3desa	87.000.000,00	3desa	87.000.000,00	3desa	87.000.000,00	3desa	87.000.000,00	3desa	87.000.000,00	4kali	200.000.000,00	19desa	153.000.000,00	548.000,00
11 Pengembangan Lumbung Pangan Desa					Jumlah lumbung desa yang dikembangkan	6 desa			6 desa	300.000.000,00	6desa	300.000.000,00	6desa	300.000.000,00	3 desa	90.000.000,00	3 desa	90.000.000,00	3 desa	90.000.000,00	18 desa	180.000.000,00	690.000,00
					12 Peringatan Hari Krida dan Hari Pangan Sedunia	Jumlah pameran yang diikuti	1 kali			1 kali	150.000.000,00	5kali	750.000,00	750.000,00									
	Meningkatnya kualitas mutu dan keamanan pangan		0203.020301.16	2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN	Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	2kali			2kali	50.000.000,00	2kali	50.000.000,00	2kali	50.000.000,00	2kali	50.000.000,00	2kali	50.000.000,00	10kali	500.000,00	200.000,00		
				2 Koordinasi, sosialisasi apresiasi mutu Pangan dan gizi	Jumlah sosialisasi mutu pangan dan gizi	3desa			3desa	70.000.000,00	3desa	70.000.000,00	3desa	70.000.000,00	3desa	70.000.000,00	3desa	70.000.000,00	3desa	70.000.000,00	15desa	350.000,00	350.000,00
	Berkembangnya otoritas Keamanan pangan		0203.020301.16	3 PROGRAM PENGEMBANGAN OTORITAS KEAMANAN	Jumlah sekolah sehat	3sekolah			3sekolah	90.000.000,00	3sekolah	90.000.000,00	3sekolah	90.000.000,00	3sekolah	90.000.000,00	3sekolah	90.000.000,00	15sekolah	450.000,00	450.000,00		
				1 Sertifikasi dan Pelabelan produk Segar Organic	Jumlah sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar organic	5sertifikasi			5sertifikasi	50.000.000,00	5sertifikasi	50.000.000,00	5sertifikasi	50.000.000,00	5sertifikasi	50.000.000,00	5sertifikasi	50.000.000,00	5sertifikasi	50.000.000,00	20sertifikasi	200.000,00	200.000,00
	Tertakutnya percepatan diversifikasi konsumsi pangan		0203.020301.16	4 PROGRAM PERCEPATAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI	Jumlah uji residu pestisida	3unit			3unit	150.000.000,00	3unit	150.000.000,00	3unit	150.000.000,00	3unit	150.000.000,00	3unit	150.000.000,00	15unit	750.000,00	750.000,00		
				2 Uji Residu Pestisida/Kimia Pangan Olahan Masyarakat	Jumlah pelatihan inspektur pengolahan pangan	2kali			2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	2kali	80.000.000,00	8kali	320.000,00	320.000,00
			0203.020301.16	5 PROGRAM PERCEPATAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI	Jumlah pemberdayaan ekonomi dan gizi	1paket			1paket	85.000.000,00	1paket	85.000.000,00	1paket	85.000.000,00	1paket	85.000.000,00	1paket	85.000.000,00	5paket	425.000,00	425.000,00		
				1 Pemberdayaan Ekonomi dan Gizi Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jumlah laporan polimenushehat	1paket			1paket	150.000.000,00	1paket	150.000.000,00	1paket	150.000.000,00	1paket	150.000.000,00	1paket	150.000.000,00	1paket	150.000.000,00	5paket	600.000,00	600.000,00
			0203.020301.16	6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah diversifikasi pangan olahan	1keg			1keg	70.000.000,00	1keg	70.000.000,00	1keg	70.000.000,00	1keg	70.000.000,00	1keg	70.000.000,00	4keg	210.000,00	210.000,00		
				2 Penyusunan Pola Menu Sehat Berdasarkan Potensi Wilayah	Jumlah koordinasi dan pembinaan percepatan diversifikasi konsumsi pangan	5kali			5kali	100.000.000,00	5kali	100.000.000,00	5kali	100.000.000,00	3kali	60.000.000,00	3kali	60.000.000,00	3kali	60.000.000,00	16kali	240.000,00	240.000,00
				5 Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman (B2SA)	Jumlah gerakan makan beragam, bergizi, berimbang dan Aman	6org/usaha			6org	85.000.000,00	6org	85.000.000,00	6org	85.000.000,00	6org	85.000.000,00	6org	85.000.000,00	30org	425.000,00	425.000,00		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	ANGGARAN TENTATIF (Rp.)														Kondisi Kinerja pada periode Renstra S		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP)	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menuju terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Tersediaanya bimtek bagi aparatur guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	0203.020301.01.001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	359 lbr	8	9	359 Lembar	2.207.700,00	359 lembar	2.453.000,00	359 lembar	2.700.000,00	359 lembar	2.989.000,00	358 lembar	3.265.000,00	2.148 Surat	15,9			
			Tersediaanya sarana prasarana penunjang operasional Dinas dan Pelempangan Kantor		Jumlah surat kilat khusus lokal kota/kabupaten yang disediakan	33 Kg			29 Kg			29 kg			29 kg			29 kg			174 kg		
			Terpeliharanya perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor		Jumlah Buku cek	-			5 buah			5 buah			5 buah			5 buah			30 buah		
					Tersediaanya dokumen rencana program/ kegiatan dan telepon	0203.020301.01.002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi/telepon	12 Bln			12 bulan	57.710.400,00	12 bulan	63.481.500,00	12 bulan	69.829.000,00	12 bulan	96.812.600,00	12 bulan	104.493.900,00	72 bulan	392,3
					Jumlah pemakaian jasa sumber daya air	12 Bln				12 bulan			12 bulan			12 bulan			12 bulan			72 bulan	
					Pelaksanaan Plan Besar Nasional dan Daerah	0203.020301.01.006	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 yang memiliki STNK dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan	2 Unit			2 unit	28.160.000,00	2 unit	30.976.000,00	3 unit	34.073.600,00	3 unit	37.480.900,00	3 unit	41.228.900,00	15 unit	171,9
					Jumlah kendaraan roda 2 yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan	112 Unit				115 unit			115 unit			115 unit			115 unit			687 unit	
							4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan yang disediakan	14 Jenis			19 jenis	154.706.695,00	19 jenis	170.177.500,00	19 jenis	187.195.500,00	19 jenis	205.915.200,00	19 jenis	228.506.700,00	114 jenis	944,50
						Jumlah tenaga kebersihan		7 Orang			9 orang		9 orang			9 orang			9 orang			54 orang	
						0203.020301.01.010	5 Penyediaan ATK	Jumlah alat tulis kantor	79 Jenis			64 jenis	100.939.830,00	64 jenis	111.033.500,00	64 jenis	122.136.800,00	64 jenis	134.350.500,00	64 jenis	147.785.500,00	384 jenis	616,24
						0203.020301.01.011		6 Penyediaan barang cetakan & pengadsian	Jumlah barang cetakan	6 Jenis			6 jenis	45.000.000,00	6 jenis	49.500.000,00	6 jenis	54.450.000,00	6 jenis	59.895.000,00	6 jenis	65.884.500,00	36 jenis
						Jumlah Peggadsian	40.000 lbr				41.126 lembar		41.126 lembar			41.126 lembar			41.126 lembar			246.756 lembar	
						Jumlah Penjilidan	35 Lembar				35 buku		35 buku			35 buku			35 buku			210 buku	
			0203.020301.01.012	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	15 Jenis			10 jenis	34.775.400,00	10 jenis	38.252.900,00	10 jenis	42.078.194,00	10 jenis	46.286.100,00	10 jenis	50.914.700,00	60 jenis	212,30			
			Jumlah pemasangan instalasi listrik		5 Pkt			2 paket		-			-		-	-			4 paket				
			0203.020301.01.016	8 Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemeliharaan jaringan instalasi listrik	1 Pkt			-			-		4 unit					8 unit				
			Jumlah Surat kabar		3 Jenis			3 jenis	6.223.000,00	3 jenis	6.845.500,00	3 jenis	7.530.050,00	3 jenis	8.283.100,00	3 jenis	9.111.500,00	3 jenis	9.111.500,00	18 jenis	37,99		
				9 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah majalah	1 Jenis			1 jenis			1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis	6 jenis				
			Jumlah makanan dan minuman		1300 Kotak			1300 kotak	43.257.500,00	1300 kotak	47.583.250,00	1300 kotak	52.341.500,00	1300 kotak	57.575.700,00	1300 kotak	63.333.300,00	1300 kotak	69.333.300,00	7800 kotak	264,09		
			0203.020301.01.018	10 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Jumlah Snack yang disediakan	1300 Kotak			1300 kotak			1300 kotak		1300 kotak		1300 kotak			7800 kotak				
			Jumlah rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah Kabupaten dan Provinsi		37 Kali			32 kali	307.928.500,00	32 kali	338.721.350,00	32 kali	372.593.500,00	32 kali	409.852.900,00	32 kali	450.837.800,00	32 kali	499.837.800,00	192 kali	1.879,93		
			0203.020301.01.019	11 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	Jumlah kunjungan kedalam daerah	170 Kali			170 kali	285.928.500,00	170 kali	314.521.350,00	170 kali	345.973.500,00	170 kali	380.570.800,00	170 kali	418.627.900,00	837 kali	1.745,62			
			0203.020301.01.020		12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	2org			2orang	19.140.000,00	4org	45.000.000,00	4org	45.000.000,00	4org	45.000.000,00	5org	60.000.000,00	19org	214,14		
			0203.020301.01.0	13 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah THL-TE	3 org			3org	75.240.000,00	3 org	75.240.000,00	5org	91.040.400,00	5org	91.040.400,00	5org	91.040.400,00	21org	423,00		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	ANGGARAN TENTATIF (Rp.)														Kondisi Kinerja pada periode Renstra 5	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			0203.020301.01.021	14 Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Jumlah Solar	2000 Liter			2000 liter	58.872.000,00	2000 liter	64.759.200,00	2000 liter	71.235.120,00	2000 liter	78.358.600,00	2000 liter	86.194.500,00	12000 liter	359.4		
			0405.020301.24.018	1 Pameran Pembangunan	Jumlah Pertamina	2500 Liter			2500 liter		2500 liter		2500 liter		2500 liter		2500 liter	2500 liter	15000 liter	200.0		
			0405.020301.24.021	2 Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	jumlah umbul-umbul yang disediakan	-			10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah	10 buah	60 buah	62.5		
			0203.020301.02.005	1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 unit			1 unit		1 unit		1 unit	3.000.000.000,00	1 unit	3.000.000.000,00		2 unit	6.000.000,00			
			0203.020301.02.005	2 Pembangunan/Rehab Pagor Gedung Kantor	Jumlah pagor kantor	1paket			1paket	100.000.000	1paket	200.000.000,00	1paket	250.000.000,00	1paket			2paket	550.000,00			
			0203.020301.02.005	3 Pembangunan/Penataan halaman Kantor	tersedianya jumlah penataan halamankantor	1unit			1paket	250.000.000	1paket	200.000.000,00	1paket		1paket			1paket	160.000.000,00	3paket	610.000,00	
			0203.020301.02.005	3 Pembangunan Tempat Parkir roda 2(dua) dan Roda 4(empat) Kantor	tersedianya jumlah tempat parkir kantor	2paket			1paket		1paket	250.000.000,00	1paket	250.000.000,00				2paket	600.000,00			
			0203.020301.02.005	4 Pembangunan/Rehab WC Kantor	tersedianya WC kantor	1 unit			2paket		2paket	270.000.000,00	2paket	270.000.000,00				4paket	540.000,00			
			0203.020301.02.005	5 Pembangunan Ruang Pertemuan/Ruang Rapat	Jumlah gedung kantor	-			1unit		1unit	350.000.000,00			1unit	350.000.000,00		1 unit	700.000,00			
			0203.020301.02.005	6 Pengadaan Mobil Dinas /mobil operasional kantor	Jumlah kendaraan mobil jabatan	2unit			1unit		1unit	400.000.000,00	1 unit	400.000.000,00	1 unit	450.000.000,00	1 unit	450.000.000,00	1 unit	3 unit	850.000,00	
			0203.020301.02.005	7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional	10 Unit			3 Unit	64.680.000,00	4 Unit	71.148.000,00	5 Unit	78.262.800,00	5 Unit	100.000.000,00	6 unit	110.000.000,00	26 Unit	424.000,00		
			0203.020301.02.012	8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC yang tersedia	2 Unit			2 unit	13.000.000,00	2 unit	13.000.000,00	2 unit	13.000.000,00	2 unit	13.000.000,00	2 unit	13.000.000,00	2 unit	13.000.000,00	12 unit	65.000,00
					mesin absensi yang tersedia	-			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit				
					jumlah filling kabinet yang tersedia	-			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit				
			0203.020301.02.010	9 Pengadaan Mebeleur	jumlah meja kerja	40 Unit			22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit	99.014.000,00	132 unit	99.014.000,00		
					Jumlah kursi kerja	50 Unit			39 unit		39 unit		39 unit		39 unit		39 unit		234 unit			
					Jumlah lemari	6 Unit			7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		42 unit			
			0203.020301.02.012	10 Pengadaan peralatan dan Pertengkapan Kantor	jumlah GPS	-							7 unit		7 unit		7 unit		7 unit			
					jumlah Goerden	-			1paket		1paket	150.000.000,00	1paket	150.000.000,00				2paket	300.000,00			
					Jumlah Sound System	-			1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	7 unit	50.000,00		
			0203.020301.02.011	14 Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah printer	7 Unit			3 unit	30.000.000,00	3 unit	30.000.000,00	3 unit	30.000.000,00	4 Unit	60.000.000,00	16 unit	135.492.250,00	16 unit	285.492.250,00		
					jumlah Laptop	5 Unit			3 unit	30.000.000,00	3 unit	30.000.000,00	3 unit	30.000.000,00	3 unit	30.000.000,00	3 unit	30.000.000,00	15 unit	150.000,00		
					jumlah komputer PC	2 Unit			4unit	45.000.000,00	4unit	45.000.000,00			2unit	22.000.000,00	5 unit	45.000.000,00	15unit	157.000,00		
			0203.020301.02.022	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit			1 unit		1 unit		1 unit	80.000.000,00	1 unit	29.000.000,00	1 unit	110.846.500,00	5 unit	219.846.500,00		
			0203.020301.02.024	12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	2 Unit			2 Unit	25.300.000,00	2 Unit	27.830.000,00	2 Unit	30.613.000,00	2 Unit	63.000.000,00	2 unit	37.042.500,00	12 Unit	183.785.000,00		
			0203.020301.02.028	13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah Perengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 Unit			10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit	37.202.700,00	61 Unit	37.202.700,00		
			0203.020301.02.030	15 Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah Komputer yang terpelihara	13 Unit			15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit	24.157.880,00	8 Unit	24.157.880,00		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	ANGGARAN TENTATIF (Rp.)														Kondisi kinerja pada periode Renstra SK		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			0203.020301.02.024	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Airspeed Boat	Jumlah Printer yang terpelihara	10 Unit		5 unit	7.000.000,00	5 unit	7.000.000,00	4 unit	6.000.000,00	3 unit	4.000.000,00	3 unit	5.000.000,00	20unit		29.000,00		
			0203.020301.03	8	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah speed boat	1 unit				1 unit	90.000.000,00	1unit	90.000.000,00	1unit	90.000.000,00						270.000,00	
			0203.020301.03	1	Pengadaan Pakain Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakain dinas sipil harian Pemda	55 stel		55stel	150.000.000,00	60stel	180.000.000,00	60stel	160.000.000,00	60stel	165.150.400,00	65stel	181.665.400,00	89stel		818.810,00		
				2	Pengadaan Pakain Training/olah raga	Jumlah Pakain Training/olahraga	55 stel		55stel	100.000.000,00	60stel	100.000.000,00	60stel	100.000.000,00	60stel	100.000.000,00	65stel	100.000.000,00	85stel		500.000,00		
				3	Pengadaan PSL Pejabat Eselon II	Jumlah Pengadaan PSL Pejabat Eselon II	-		-	-	-	-	1 stel	2.000.000,00	-	-	-	-	1 stel		2.000,00		
				4	Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III	Jumlah Pengadaan PSR Pejabat Eselon II dan III	-		-	-	-	-	6 Buah	5.100.000,00	-	-	-	-	6 buah		5.100,00		
				5	Pengadaan PSH Pejabat Eselon II dan III	Jumlah Pengadaan PSH Pejabat Eselon III	-		-	-	-	-	4 Buah	3.200.900,00	-	-	-	-	4 buah		3.200,00		
				6	Pengadaan pakain batik nasional dan daerah	Jumlah pakain batik nasional dan daerah	-		-	-	-	-	65 stel	160.000.000,00	-	-	-	-	65 stel		160.000,00		
			0203.020301.05	9	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	jumlah alat absensi	1unit						1unit	100.000.000,00	1unit	100.000.000,00	1unit	100.000.000,00			300.000,00		
				1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	6 Orang		7 orang	148.786.000,00	7 orang	163.664.600,00	7 orang	160.031.000,00	7 orang	198.034.100,00	7 orang	217.837.800,00	42 orang		908.350,00		
				2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			0203.020301.06	10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah data	1keg		1keg	30.000.000,00	1keg	30.000.000,00	1keg	30.000.000,00	1keg	30.000.000,00	3org	30.000.000,00	3keg		120.000,00		
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
				2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	1 Dok		2 Dok	-	11 Dok		-										
				3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	3.732.460,00	1 Dok	3.732.450,00	6 Dok		18.960,00								
				4	Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah dokumen	-		1 Dok	-	8 Dok		-										
				5	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
				6	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
				7	Laporan Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
				13	Pengadaan Buletin Ketahanan Pangan	Jumlah Artikel	12kali		12kali	70.000.000,00	12kali		350.000,00										
				14	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan ketersediaan dan distribusi pangan	Jumlah laporan ketersediaan dan distribusi pangan	14kec		14 Kec	120.000.000,00	14 kec		480.000,00										
			0203.020301.16	11	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN																		
				1	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Distribusi Pangan	Jumlah koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan	2kali		2kali	70.000.000,00	8kali		280.000,00										
				2	Penyusunan Peta Distribusi	Jumlah peta distribusi pangan	1kali		1kali	40.000.000,00	4kali		160.000,00										
				3	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Pedesaan	Jumlah pengembangan Usaha lembaga distribusi Pangan Pedesaan	2lembaga		2lembaga	80.000.000,00	8lembaga		320.000,00										
				4	Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan	Jumlah koordinasi dan pemantauan distribusi pangan	2kali		2kali	50.000.000,00	10kali		250.000,00										
				5	Pengembangan Jaringan Informasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HEKON)	Jumlah jaringan informasi ketersediaan pangan	1keg		1keg	70.000.000,00	4kali		280.000,00										
			7	15	Sosialisasi Program Desa Mandiri Pangan	Jumlah kecamatan dan desa	3desa		3desa	90.000.000,00	15desa		450.000,00										

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	ANGGARAN TENTATIF (Rp.)														Kondisi Kinerja pada periode Renstra
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3 Tersedia sistem penyuluh perikanan	4 0301.020301.20	2 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUH PERIKANAN	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1 Penyediaan Sarana/Prasarana Penyuluh Perikanan	Jumlah sarana prasarana penyuluh	3unit					3unit	300.000.000,00	3unit	300.000.000,00	3unit	300.000.000,00	12unit	300.000.000,00	3unit	1.200.000.000,00	
			0301.020301.20	18 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN																	
				1 Kemitraan Antar Pelaku Utama Perikanan dan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok mitra yang ada	3 Kecamatan			3 Kecamatan	45.000.000,00	3 Kecamatan	45.000.000,00	3 Kecamatan	45.000.000,00	3 Kecamatan	45.000.000,00	3 Kecamatan	45.000.000,00	15 Kecamatan	15 Kecamatan	225.000.000,00
				2 Pengadaan Sarana/Prasarana Pengolahan Ikan	Tersedianya jumlah sarana prasarana pengolahan ikan	2paket			2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	10paket	10paket	500.000.000,00
				3 Pengembangan Sarana/Prasarana Pemasaran Perikanan	Tersedianya jumlah sarana prasarana pemasaran perikanan	2paket			2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	2paket	100.000.000,00	10paket	10paket	500.000.000,00
				4 Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Lomba Masak Berbahas Melalui Lomba Masak Berbahas Utama Ikan	Terlaksananya lomba masak berbahan utama ikan TK.Kabupaten dan Provinsi	1paket			1paket	118.000.000	1paket	118.000.000	1paket	118.000.000	1paket	118.000.000	1paket	118.000.000	1paket	1paket	472.000.000,00
TOTAL									7.310.062.775,00		12.327.642.606,00		16.624.111.634,00		15.793.701.550,00		12.304.249.160,00		63.843.700,00		

Sintang, Januari 2019
 Kepala Dinas KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SINTANG

**DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
 P. ZULKARNAENI, M.Si
 Pembantu Utama Muda
 NIP.196111011993031006